

## ABSTRAK

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai Negara. Misalnya saja kasus tindak kekerasan seksual anak yang terjadi di Indonesia pada Tahun 2018 di Desa Cikempong, Pakansari, Kab. Bogor yang dilakukan oleh Terdakwa HI umur 40 tahun kepada tetangganya yaitu korban Jono umur 14 tahun dan Jeni umur 7 tahun bukan nama sebenarnya. Aksi bejat terdakwa akhirnya diketahui orangtua kakak beradik itu, lantas orangtua Jono dan Jeni melaporkan kasus ini ke polisi pada september 2018 lalu. Tetapi setelah perkaranya sampai pada persidangan yang berlangsung pada tanggal 25 Maret 2019 seorang Hakim Pengadilan Negeri Cibinong memutuskan bebas pelaku tindak kekerasan seksual terhadap korban kakak beradik, Jono dan Jeni. Alasan pertimbangan hakim membebaskan pelaku yaitu tidak adanya saksi yang melihat kejadian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan putusan hakim yang membebaskan terdakwa pelaku tindak kekerasan seksual pada anak dibawah umur sebagaimana putusan perkara No. 677/PID.SUS/2018/PN cbi, dan 2) Untuk mengetahui sanksi pidana yang seharusnya di berikan hakim kepada terdakwa yang melakukan tindak kekerasan seksual anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dimana untuk menemukan proses suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.yang berkaitan dengan Putusan hakim yang memutuskan bebas terdakwa dan sanksi yang seharusnya diberikan kepada terdakwa tindak kekerasan seksual anak. Spesifikasi penelitian dengan menguraikan putusan dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan sekunder, dan tertier, yang berkaitan dengan topik untuk menyelesaikan permasalahan dari bagian analisis data. Hasil dari penelitian adalah: 1) Hakim pengadilan negeri Cibinong memutuskan bebas terdakwa HI melihat berdasarkan dari dakwaan penuntut umum yang berbentuk dakwaan kumulatif, hakim tidak mempertimbangkan putusan tersebut dengan melihat dari sisi korban yang masih anak-anak dan hakim seharusnya melihat dari keyakinan hati nurani hakim itu sendiri. 2) Sanksi yang seharusnya diberikan kepada terdakwa tindak kekerasan seksual pencabulan anak adalah berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang mana dalam Pasal 82 ayat (1) di pidana penjara maksimal 15 Tahun.

**Kata Kunci: Putusan Hakim, Tindak Kekerasan Seksual Anak, Sanksi**

## **ABSTRACT**

*In Indonesia cases of sexual violence have increased every year, the victims are not only from adults but now it has spread to teenagers, children and even toddlers. The phenomenon of sexual violence against children is increasingly occurring and is becoming almost global in various countries. For example, cases of child sexual violence that occurred in Indonesia in 2018 in the village of Cikempong, Pakansari, Kab. Bogor conducted by Defendant HI aged 40 years to his neighbor namely victim Jono aged 14 years and Jeni aged 7 years is not his real name. The defendant's depraved actions were finally discovered by the siblings' parents, then Jono and Jeni's parents reported the case to the police in September 2018. But after the case arrived at the trial which took place on March 25, 2019, a Cibinong District Court Judge acquitted the perpetrators of sexual violence against siblings, Jono and Jeni. The reason for the judge's consideration of releasing the perpetrator is the absence of witnesses who saw the incident. The objectives of this study are: 1) to find out and analyze the considerations of the judge's decision to acquit the defendant of sexual violence against minors as the case decision No. 677 / PID.SUS / 2018 / PN cbi, and 2) To find out the criminal sanctions that should be given by judges to defendants who commit acts of child sexual violence as regulated in Act Number 35 of 2014 concerning amendments to Act Number 23 of the Year 2002 on Child Protection. This research uses a normative juridical approach whereby to find the process of a rule of law, legal principles and legal doctrines in order to answer the legal issues faced. Research specifications by outlining the decision of the judge's judgment in imposing sanctions. The data collection technique used is the study of literature on primary, secondary and tertiary legal materials, related to the topic to solve problems from the data analysis section. The results of the study are: 1) The Cibinong District Court Judge decided the defendant HI was free to see based on the indictment of the public prosecutor in the form of a cumulative indictment, the judge did not consider the decision by looking at the child victims and the judge should have seen from the judge's conscience. itself. 2) Sanctions that should be given to defendants for sexual abuse of child abuse are based on Law No. 35 of 2014 concerning Amendment to Law No. 23 of 2002 concerning Protection of children which in Article 82 paragraph (1) is imprisoned for a maximum of 15 years.*

**Key Words: Judge's Decision, Child Sexual Violence, Sanctions**